

PERBANDINGAN AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH AUDITOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
DENGAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Aisha Safira Mahdapati

2010130268

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN – PT  
No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017

*THE COMPARISON OF INDEPENDENT AUDITING ON FINANCIAL  
STATEMENT BETWEEN AUDITORS OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND AUDITORS OF THE  
AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*



*UNDERGRADUATE THESIS*

*Submitted to complete the requirements of  
A Bachelor Degree in Economics*

*By:*

*Aisha Safira Mahdapati*

*2010130268*

*PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY*

*FACULTY OF ECONOMICS*

*ACCOUNTING DEPARTMENT*

*(Accredited based on the Degree BAN-PT*

*No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)*

*BANDUNG*

*2017*

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**PERBANDINGAN AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH AUDITOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
DENGAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Oleh:

**Aisha Safira Mahdapati**

**2010130268**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Bandung, 8 Agustus 2017**

**Ketua Program Studi Akuntansi,**

**Gery Raphaël Lusanjaya, SE., MT**

**Pembimbing,**

**Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Aisha Safira Mahdapati  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 April 1994  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2010130268  
Program studi : Akuntansi  
Jenis naskah : Skripsi

### JUDUL

PERBANDINGAN AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH AUDITOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
DENGAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

dengan,

Pembimbing : Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.



### SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:  
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,  
Dinyatakan tanggal : 8 Agustus 2017  
Pembuat pernyataan :



(Aisha Safira Mahdapati)

## ABSTRAK

Setiap entitas yang menjalankan kegiatan operasionalnya membuat laporan keuangan untuk mempresentasikan kinerja entitas. Laporan keuangan menjadi alat komunikasi kepada pihak eksternal entitas. Agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan harmonis maka informasi yang dinyatakan dalam laporan keuangan harus merupakan data yang valid dan dapat diuji kebenarannya. Namun terdapat kemungkinan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan kenyataan karena yang menyiapkan laporan memiliki kepentingan.

Informasi yang tertera di laporan keuangan seharusnya diperiksa kesesuaian kontennya dengan kriteria yang berlaku secara umum oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan atas keuangan entitas. Pihak yang independen tersebut disebut dengan auditor. Di Indonesia fungsi audit atas laporan keuangan dapat dijalankan oleh dua pihak, yaitu auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini membandingkan proses audit yang dilakukan oleh KAP dengan BPK. Tujuan audit KAP maupun BPK adalah menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Teori perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk dapat melihat lebih jauh perbandingan dari kedua praktik audit ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbandingan proses audit yang dilakukan oleh auditor KAP dan auditor BPK, dan mengetahui apa yang dilakukan oleh auditor KAP dan auditor BPK atas temuan indikasi *fraud*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerja antara auditor KAP dengan auditor BPK memiliki beberapa perbedaan, diantaranya BPK tidak melalui proses penerimaan klien, namun menentukan sendiri objek pemeriksaan. Cara auditor KAP dan BPK menanggapi temuan yang terdapat di audit laporan keuangan juga berbeda. Jika auditor KAP menemukan indikasi *fraud*, maka dilihat terlebih dahulu signifikansinya. Jika signifikan maka auditor KAP menginformasikan kepada direksi, komisaris dan komite audit agar dapat meminta pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan atas indikasi *fraud* tersebut. Sedangkan BPK akan menyatakan indikasi *fraud* pada laporan audit. Laporan audit tersebut diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD lalu melaporkannya pada pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Audit, Auditor KAP, Pemeriksa BPK, SPAP, SPKN

## ABSTRACT

*Every entity that runs its operational activities makes a financial statement to present the entity's performance. The financial statements become a means of communication to an external entity. In order to communicate run well, the information in the financial statement must be valid and verifiable data. However there is a possibility that the financial statement is differ from the reality because that the preparer have his personal interest.*

*The information contained in the financial statements should be audited for its conformity with a certain criteria by an independent party with no specific interest on entity's financial condition. The independent party is called the auditor. In Indonesia, the function of financial statement audit can be conducted by auditor of Public Accounting Firm (KAP) and auditor of the audit board of the Republic Indonesia (BPK). This research is comparing audit process between auditors of KAP and auditors of BPK. The purpose of both KAP and BPK audit is to give an opinion on the financial statements examined. The comparative theory used in this study is the Public Accountants Professional Standards (SPAP) and State Auditing Standards (SPKN) to these two audit practices.*

*This research is a qualitative research using case study method. The study was conducted to find out the comparison of audit process between auditors of KAP and auditors of BPK, and to know the findings in the financial statement audit process. And to know auditors of KAP and auditors of BPK response on any finding of fraud indication.*

*The result of the research shows that the work process between the auditor of KAP with auditor of BPK has some differences, such as that BPK does not have client acceptance process, but it determines the object of examination by itself. The way KAP and BPK auditors respond to the findings contained in the audit of financial statements is also different. If the auditors of KAP finds an indication of fraud, then it is first seen significance. If it is significant, the auditors of KAP informs the board of directors, commissioners and audit committee in order to request a third party to investigate the fraud indication. While the BPK will state the indication of fraud in the audit report. The audit report will be submitted to the DPR, DPRD, and DPD, then BPK will report the fraud indication to the authorities.*

*Keywords: Financial Report, Audit, KAP Auditor, BPK Auditor, SPAP, SPKN*

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari kampus tempat penulis menempuh pendidikan strata 1, Universitas Katolik Parahyangan.

Segala hal yang menghantarkan penulis sampai pada saat ini untuk menyelesaikan skripsi tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Ibu Dameria Tondang dan Bapak Mahyunis, orang tua yang merawat, membesarkan serta mendidik penulis hingga detik ini.
2. Jade Maulana Mahdapati dan Alver Berlianta Mahdapati, kakak dan adik yang selalu memberikan nasihat dan dukungan moral.
3. Ibu Dr. Maria Merry Marianti, Dra., M.Si., Dekan FE Universitas Katolik Parahyangan
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T., Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Wali penulis.
5. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak, Dosen Pembimbing penulis.
6. Ibu Dr. Judith Felicia Pattiwael, Dra., M.T., Dosen FE Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis pada saat memulai skripsi ini.
7. Bapak Aris, Kepala TU FE Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar dan Staf Tata Usaha FE Universitas Katolik Parahyangan.
9. Sahabat seperjuangan akuntansi yang sudah lulus terlebih dahulu, Valerina Jasmine, Vidia Nurul S., Anisah Mery Natalia, dan Ainun Zamira.
10. *Team Wandering Season Mountaineering Mount*. Geureundong 2014 beserta pembimbing tim, Azka Layalia Safanah, Maria Angela Handoyo, Satria Wijayakusuma, dan (Alm.) Kresno Handrianto.
11. Teman seperjuangan Angkatan Magahtapak Baladasura, Mahitala.
12. Keluarga besar Mahitala.
13. Sahabat penulis, Primarily Ramadhian dan Riandita Amanda.
14. Sahabat dari semasa SMA kelas Akselerasi 7, Wira Hanifah, Vivi Mulya Ningsih, Dian Ikramina, Luthfi Kamil, Rizky Eko Putra, dan Melga Halim.

15. Kepengurusan Himpunan Program Studi Akuntansi 2011-2012.
16. Panitia majalah akuntansi Newsletter 2011-2012.
17. Sahabat dari Sisपाल Galapagos, Annisa Filania, Resti Fortuna Pradani, Rivdhal Saputra, Muhammad Taufik, Muhammad Krisno Marlardang, dan Fikri Aswan.
18. Teman-teman Seminar Audit Keuangan, Tasya, Stefani, Cynthia, Erick, Vania, Shirley, Leilani, Jonathan, dan Evelyn. Terima kasih atas kebersamaannya selama seminar.
19. Teman-teman seper-Kost-an, Sari Dewi, Sharon Jesephine, Sarah Audilya Miharto, Gabriela Alinda Mamonto, dan Safira Adlina.
20. Dan pihak-pihak yang turut memberikan kontribusinya yang tidak dapat disebutkan satu-per-satu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan di berbagai sisi. Kritik dan saran adalah hal yang sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki skripsi ini. Harapan penulis ialah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi para pembaca dan memperdalam wawasan mengenai perbandingan audit yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

Bandung, 8 Agustus 2017

Aisha Safira Mahdapati



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TABEL .....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN .....	XV
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	2
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN .....	3
1.4. KERANGKA PEMIKIRAN .....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. LAPORAN KEUANGAN.....	8
2.1.1. DEFINISI LAPORAN KEUANGAN.....	8
2.1.2. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN .....	9
2.1.3. KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN.....	10
2.1.4. JENIS LAPORAN KEUANGAN.....	13
2.2. AUDIT.....	16
2.2.1. PENGERTIAN AUDIT.....	16
2.2.2. JENIS-JENIS AUDIT .....	17
2.2.3. AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	18
2.2.4. TUJUAN AUDIT .....	19
2.2.5. PERBEDAAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR DAN MANAJEMEN .....	19
2.2.6. MATERIAL AND IMMATERIAL MISSTATEMENT .....	20
2.2.7. REASONABLE ASSURANCE.....	20
2.2.8. BUKTI AUDIT.....	21
2.2.9. OPINI .....	22
2.3. FRAUD.....	24
2.3.1. PENGERTIAN FRAUD .....	24
2.3.2. FRAUD TRIANGLE .....	25
2.3.3. JENIS FRAUD.....	26
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	28
3.1. METODE PENELITIAN .....	28
3.1.1. SUMBER DATA.....	28
3.1.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	29
3.1.3. METODE ANALISIS DATA .....	30
3.2. OBJEK PENELITIAN .....	33
3.2.1. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) .....	33
3.2.1.1. DASAR HUKUM BPK .....	33
3.2.1.2. PENGERTIAN BPK.....	34

3.2.1.3. WEWENANG BPK .....	34
3.2.1.4. VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS BPK .....	35
3.2.1.5. STRUKTUR ORGANISASI DAN JOB DESCRIPTION BPK .....	36
3.2.1.6. STANDAR PEMERIKSAAN BPK .....	45
3.2.1.7. HASIL PEMERIKSAAN.....	45
3.2.2. KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP).....	46
3.2.2.1. DASAR HUKUM KAP .....	46
3.2.2.2. PENGERTIAN AKUNTAN PUBLIK DAN KAP .....	46
3.2.2.3. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK .....	47
3.2.2.4. ORGANISASI PROFESI AKUNTANSI .....	48
3.2.2.5 STANDAR PEMERIKSAAN .....	48
3.2.2.6 STRUKTUR ORGANISASI DAN JOB DESCRIPTION KAP .....	51
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	53
4.2. ANALISIS HASIL WAWANCARA.....	53
4.3. KARAKTERISTIK BPK DAN KAP .....	56
4.4. PEMAHAMAN STANDAR .....	57
4.5. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN.....	80
4.6. ANALISIS LAPORAN AUDIT .....	86
4.7. ANALISIS TEMUAN AUDIT .....	87
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
5.1 KESIMPULAN .....	88
5.2 SARAN.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Kerangka Pemikiran .....	7
Gambar 2-1. <i>Fraud Triangle</i> .....	25
Gambar 3-1. <i>Four Step Coding</i> .....	32
Gambar 3-2. Struktur Organisasi BPK RI .....	37
Gambar 3-3. SPAP 2013 .....	49
Gambar 3-4. Struktur Organisasi KAP .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Standar Profesional Akuntansi Publik .....	51
Tabel 4.1.	Perbedaan Karakteristik BPK dan KAP.....	56
Tabel 4.2.	Perbandingan SPAP dan SPKN.....	59
Tabel 4.3.	Perbandingan Laporan Keuangan yang diaudit KAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. WAWANCARA NARASUMBER KAP 1
- LAMPIRAN 2. WAWANCARA NARASUMBER KAP 2
- LAMPIRAN 3. WAWANCARA NARASUMBER BPK 1
- LAMPIRAN 4. WAWANCARA NARASUMBER BPK 2
- LAMPIRAN 5. REKAP OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- LAMPIRAN 6. PROSES CODING LEVEL 2 NARASUMBER KAP 1
- LAMPIRAN 7. PROSES CODING LEVEL 2 NARASUMBER KAP 2
- LAMPIRAN 8. PROSES CODING LEVEL 2 NARASUMBER BPK 1
- LAMPIRAN 9. PROSES CODING LEVEL 2 NARASUMBER BPK 2
- LAMPIRAN 10 DAFTAR PERMINTAAN DATA KAP
- LAMPIRAN 11 LAPORAN AUDIT KAP 1
- LAMPIRAN 12 LAPORAN AUDIT KAP 2
- LAMPIRAN 13 LAPORAN AUDIT BPK 1
- LAMPIRAN 14 LAPORAN AUDIT BPK 2
- LAMPIRAN 15 LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dengan perkembangan ekonomi global dan transaksi yang semakin kompleks maka dibutuhkan pelaporan keuangan yang akurat. Pelaporan keuangan diperlukan untuk kepentingan entitas dan pihak-pihak yang terkait, baik penyedia dana bagi entitas maupun pihak-pihak yang secara tidak langsung menerima dampak dari aktivitas entitas dalam menjalankan usahanya. Pengguna laporan keuangan memiliki *range* yang cukup luas, sehingga pelaporan keuangan entitas diharapkan tidak memihak salah satu pengguna saja, misalnya investor. Oleh karena itu muncul kebutuhan baru, yaitu audit atas laporan keuangan.

Audit atas laporan keuangan merupakan proses dimana laporan keuangan diperiksa oleh pihak independen yang pada akhir proses pemeriksaan, auditor akan memberikan opini terkait isi dari laporan keuangan tersebut, apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan kenyataan yang ada atau belum. Audit atas laporan keuangan ini biasa dikenal dengan *financial statement audit*.

*Financial statement audit* merupakan salah satu jenis audit yang dapat dilakukan jika audit dikategorikan berdasarkan objek yang dinilainya. Jika dilihat dari subjek yang menjalankan audit tersebut, maka audit dapat dibagi ke dalam dua kategori subjek, yaitu auditor pemerintah dan akuntan publik. Akuntan publik yang dimaksud dipenelitian ini adalah akuntan publik yang tergabung ke dalam Kantor Akuntan Publik yang menjalankan fungsi sebagai *financial statement auditor*. Pemerintah Indonesia memiliki beberapabadan yang menjalankan fungsi audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal (Itjen). Penelitian ini hanya memfokuskan pada BPK saja, karena ketiga badan tersebut melakukan audit pada entitas dengan kondisi berbeda yaitu, (1) BPK berfungsi menjalankan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara; (2) BPKP menjalankan pemeriksaan pada proyek pembangunan; dan (3) Itjen melakukan fungsi pengawasan pada lingkungan internal Kementerian Keuangan. Walaupun teori-teori yang mendasari *standard operational procedure* dikedua sektor relatif sama, namun penelitian ini berusaha

membahas perbandingan audit BPK dan KAP tersebut tersebut untuk dapat melihat kecenderungan temuan keduanya.

Akuntan publik yang tergabung ke dalam Kantor Akuntan Publik dan auditor pemerintah yang tergabung ke dalam Badan Pemeriksa Keuangan merupakan individu-individu profesional dan independen. Kedua pihak tersebut memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas laporan keuangan, dan menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material (*material misstatement*) dan telah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku sehingga para pengguna dari laporan keuangan dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan.

Hal yang menjadi fenomena di Indonesia ialah tingginya tingkat *fraud* dari masa ke masa, baik di entitas pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Salah satu contoh kasus yang saat ini sedang banyak dibicarakan ialah kasus korupsi e-KTP, dan penipuan yang berkedok kredit bank. Ada beberapa bentuk *fraud*, yaitu *Fraudulent Financial Statement*, *Missappropriation of Assets*, dan *Corruption*. *Fraud* hampir dapat ditemukan di berbagai kegiatan dan berbagai industri, dari bentuk kecil seperti pemotongan jam kerja hingga skala besar seperti pencurian uang negara, dan dari nilai nominal yang kecil hingga triliunan rupiah.

Dengan memperbandingkan dan menganalisis proses audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan, diharapkan dapat menemukan tren temuan dari masing-masing pihak, yang mana jika dikerucutkan dan dianalisis lebih dalam diharapkan dapat memberikan solusi atas tingginya tingkat *fraud*. Hal-hal tersebut diatas yang mendasari dilakukannya penelitian tentang perbandingan antara audit yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, beberapa masalah terkait dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan proses kerja antara auditor Kantor Akuntan Publik dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan ?

2. Apa yang dilakukan oleh auditor KAP dan auditor BPK atas temuan indikasi *fraud* ?

### **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, berikut adalah beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai:

1. Memberi pemahaman mengenai perbedaan proses kerja antara auditor Kantor Akuntan Publik dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Memberi pengetahuan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh auditor Kantor Akuntan Publik dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan jika ditemukan indikasi *fraud*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Pembaca**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai proses audit yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan bagi para pembaca.

#### **2. Auditee**

Hasil penelitian ini dapat mendorong *auditee* meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada *user* dari laporan keuangan dengan melihat kecenderungan salah saji yang ditemukan oleh auditor.

#### **3. User Laporan Keuangan**

Hasil penelitian ini dapat membantu *user* laporan keuangan menilai lebih dalam laporan keuangan entitas untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan hasil audit atas laporan keuangan entitas tersebut.

### **1.4. KERANGKA PEMIKIRAN**

Entitas membuat laporan keuangan yang berisikan informasi kegiatan dan operasionalnya dalam nilai nominal yang dapat diukur untuk suatu periode tertentu. Laporan keuangan menurut Kieso, dkk. (2014:5) merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran historis kondisi entitas yang dihitung dalam ukuran uang. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan (*Financial Statement of Position*), (2) Laporan Laba Rugi



(*Income Statement*), (3) Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Change in Equity*), dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk melindungi kepentingan *user* terhadap laporan keuangan yang disusun oleh entitas tersebut, dibutuhkannya audit atas laporan keuangan atau yang biasa dikenal dengan *financial statement audit* yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan atas entitas yang diauditnya. Menurut Arens, dkk. (2017:28) audit ialah akumulasi dan evaluasi dari bukti terkait informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesinambungan antara informasi dan kriteria. Audit harus dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen.

Menurut Arens, dkk. (2017:28) dalam melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi (*verifiable form*) dan beberapa standar (*criteria*) yang digunakan untuk mengevaluasi informasi. Informasi yang dimaksud ialah data yang dapat dinilai dari entitas seperti laporan keuangan, atau data yang lebih subjektif seperti tingkat efektivitas dari suatu proses operasi di entitas.

Berdasarkan SAS 1 (AU 110, PCAOB, 2017) menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap laporan keuangan yang bebas dari salah saji, baik yang disebabkan *error* maupun *fraud*. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai, namun tidak mutlak, jaminan bahwa salah saji material terdeteksi.

Menurut Arens, dkk. (2017:30) sejalan dengan semakin kompleksnya masyarakat, pembuat keputusan semakin mungkin menerima informasi yang tidak dapat diandalkan. Cara yang paling umum agar pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang dapat andal ialah dengan diadakannya audit yang independen. Audit dapat berperan dalam mengurangi risiko yang terkandung di dalam informasi tersebut. Secara teknis auditor memberikan jaminan keandalan atas informasi yang terkandung pada laporan keuangan.

Public Company Accounting Oversight Board (2017) menyatakan tujuan dari audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah menyatakan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan dimana entitas menyajikan, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kasnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat tersebut dikenal dengan opini auditor yang dinyatakan pada laporan audit.

Public Company Accounting Oversight Board (2017) menjelaskan bahwa laporan audit adalah media di mana auditor mengungkapkan pendapatnya atau, jika keadaan mengharuskan, menolak memberikan opini. Auditor pada laporan tersebut menyatakan apakah auditnya telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Standar ini mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Pernyataan tersebut yang biasa dikenal dengan opini auditor yang terdapat pada laporan audit.

Hal-hal yang menentukan opini dari auditor ialah hasil dari temuannya selama proses audit berlangsung dari perencanaan audit sampai dengan laporan audit diterbitkan. Opini tersebut berdasarkan fakta yang diperoleh auditor dalam mengumpulkan bukti audit. Auditor bertanggung jawab penuh atas opini yang diterbitkannya menyangkut laporan keuangan yang diauditnya.

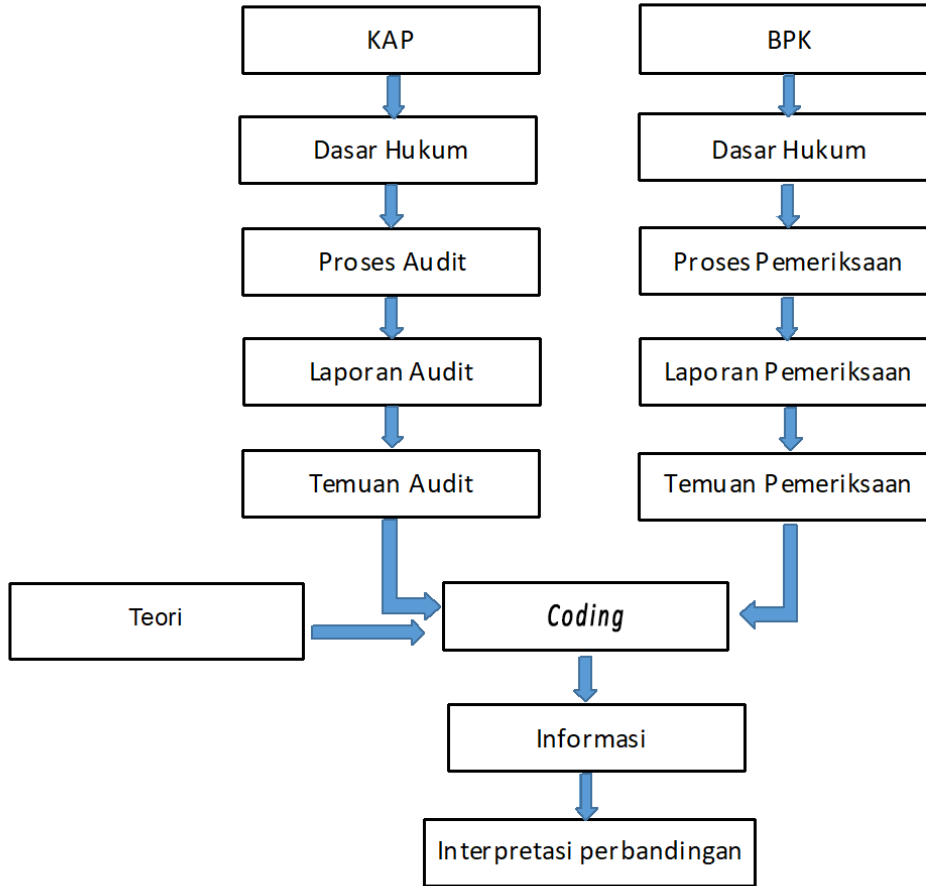
Di Indonesia pihak-pihak yang memiliki wewenang dan dapat mengeluarkan opini atas laporan keuangan diantaranya ialah auditor yang tergabung ke dalam Kantor Akuntan Publik dan auditor yang tergabung ke dalam Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua pihak tersebut melakukan audit kepada entitas yang berbeda. Pada umumnya Kantor Akuntan Publik melakukan audit pada perusahaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit pada entitas yang mendapatkan aliran dana dari pemerintah. Dari hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan tidak menutup kemungkinan ditemukan ketidaksesuaian antara kenyataan dengan yang dinyatakan di dalam laporan keuangan. Perbedaan dapat terjadi karena berbagai hal, baik *error* maupun *fraud*. Jika dilihat dari definisi sempitnya *error* merupakan kesalahan yang tidak disengaja, sedangkan *fraud* ialah kesalahan yang disengaja. Albrecht, dkk. (2002:6)

menyatakan *fraud* ialah semua bentuk tipu daya yang dipaksakan oleh satu kelompok/orang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan keterangan palsu/dimanipulasi.

Baik *error* maupun *fraud*, jika nilainya material auditor bertanggung jawab untuk mengungkapkannya, serta hal-hal yang material lainnya yang jika diungkapkan dapat mengubah pengambilan keputusan *user*. Hal-hal yang material tersebut menentukan opini apa yang akan dinyatakan oleh auditor. Namun tidak berarti jika auditor menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian, berarti entitas tersebut ‘pasti’ bebas dari salah saji material. Hal ini karena audit baik yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik maupun Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan *sampling* bukti audit dari semua populasi bukti audit. Oleh karena itu, dalam audit dikenal istilah *reasonable assurance but not absolute* (keyakinan yang memadai tapi tidak mutlak).

Auditor Kantor Akuntan Publik dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tujuan audit yang sama, yaitu mengeluarkan opini atas laporan keuangan entitas yang diaudit. Kedua auditor ini memiliki prosedur dan dasar hukum masing-masing. Penelitian ini mencoba melaksanakan perbandingan audit yang dilaksanakan oleh auditor Kantor Akuntan Publik dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh dari narasumber auditor Kantor Keuangan Publik dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan sebagai informan melalui proses wawancara, untuk selanjutnya di-*coding* sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan interpretasi perbandingan secara mendalam.

Gambar 1-1.  
Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis (2017)